



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 4 Tahun 2024 Page 8324-8334

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Analisis Kebijakan Pendidikan Sekolah Dasar Prespektif Lingkungan Pendidikan Sekolah

Galuh Prabowo^{1✉}, Ahmad Nur Hafid², Mufasirul bayani³

Universitas KH Mukhtar Syafa'at

Email: galuhprabowo99@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Pendidikan memungkinkan generasi untuk menjalani hidup dan mencapai tujuan mereka secara lebih efektif dan efisien. Pendidikan tidak hanya memberikan pengetahuan kepada siswa, tetapi juga memberikan nilai-nilai. Pendidikan berfungsi sebagai platform media sosial untuk penyebaran budaya lokal dan transmisi pengetahuan kepada siswa. Meningkatkan tingkat partisipasi pendidikan dan meningkatkan kemampuan menulis di Indonesia. Sebagai elemen penting dari sistem pendidikan nasional. Namun demikian, siswa sering mengalami kurangnya kepercayaan diri dalam mematuhi sistem pendidikan formal yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan selama proses pendidikan. yang bertujuan untuk memberikan informasi tentang analisis kurikulum sekolah dasar dari perspektif lingkungan sekolah dan sumber referensi. Artikel ini disusun dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan tinjauan pustaka, yang juga disebut sebagai penelitian kepustakaan. Melakukan tinjauan pustaka sesuai dengan teori yang telah dibahas di bidang manajemen pendidikan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pembuatan kebijakan harus dimodifikasi untuk memperhitungkan berbagai faktor yang memfasilitasi implementasi kebijakan yang efektif. Sebelumnya, pendidikan Islam hanya dianggap sebagai materi. Namun, persepsi publik telah berkembang, dan sekarang dianggap sebagai suatu institusi, suatu budaya dan aktivitas, dan suatu sistem.

Kata Kunci : *Analisis Kebijakan, Pendidikan Sekolah Dasar, Prespektif Lingkungan Sekolah*

Abstract

Education Enables Generations To Live Their Lives And Achieve Their Goals More Effectively And Efficiently. Education Not Only Provides Knowledge To Students, But Also Provides Values. Education Serves As A Social Media Platform For The Dissemination Of Local Culture And The Transmission Of Knowledge To Students. Increasing The Level Of Education Participation And Improving Writing Skills In Indonesia. As An Important Element Of The National Education System. However, Students Often Experience A Lack Of Confidence In Complying With The Formal Education System Set By The Ministry Of Education And Culture During The Education Process. Which Aims To Provide Information On The Analysis Of Elementary School Curriculum From The Perspective Of The School Environment And Reference Sources. This Article Is Compiled Using A Qualitative Approach And Literature Review, Also Known As Library Research. Conducting A Literature Review In Accordance With The Theories That Have Been Discussed In The Field Of Educational Management. The Findings Of The Study Indicate That Policy Making Must Be Modified To Take Into Account Various Factors That Facilitate Effective Policy Implementation. Previously, Islamic Education Was Only Considered As Material. However, Public Perception Has Evolved, And It Is Now Considered An Institution, A Culture And Activity, And A System. Keywords: *Policy Analysis, Elementary School Education, School Environment Perspective.*

PENDAHULUAN

Generasi dipersiapkan untuk menjalani hidup dan mencapai tujuan mereka secara lebih efektif dan efisien melalui pendidikan. Pendidikan tidak hanya mencakup pemberian pengetahuan kepada siswa tetapi juga pemberian nilai-nilai. Lebih jauh, agar siswa dapat berkembang, pendidikan merupakan pekerjaan budaya yang mengharuskan mereka untuk terus mengembangkan orisinalitas dan potensi mereka. Pendidikan yang bermutu tinggi tidak hanya dapat meningkatkan kapasitas intelektual siswa, tetapi juga mengintegrasikan tiga kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual. (Salimian et al., 2017), (Condé & Martens, 2020)

Proses pendidikan yang disengaja untuk mendidik generasi muda agar menjadi manusia yang berbakti kepada umat manusia sesuai dengan kodratnya yakni berguna bagi orang lain, bagi dirinya sendiri, bagi lingkungan beserta isinya, dan bagi peradaban dikenal dengan sebutan pendidikan. Meskipun memiliki tujuan yang baik, lembaga pendidikan menghadapi sejumlah kendala yang perlu diperhatikan. Kecepatan perubahan baik yang positif maupun yang negatif menjadi salah satu kendala utama. Menambahkan unsur-unsur evolusi zaman ke dalam kurikulum pendidikan Islam merupakan cara masyarakat pendidikan Islam menanggapi perubahan keadaannya. Kedua aspek ini terkait dengan kemajuan penelitian dan ilmu pengetahuan secara umum.

Dalam dunia yang ideal, kurikulum Islam akan mampu meningkatkan dan memperkuat hard skills dan soft skills, yang meliputi sikap, ketrampilan, dan pengetahuan. Di negara mana pun, kurikulum tidak kebal terhadap kesulitan yang dihadapi oleh siswa, karena siswa membutuhkan dukungan lembaga pendidikan untuk memperkuat dan meningkatkan kemampuan mereka sendiri. Melalui perubahan kurikulum pendidikan, guru dapat memperkenalkan ide-ide mereka, yang merupakan sarana untuk mencerahkan dan memperkuat karakter siswa mereka. Berdasarkan hal ini, penulis ingin mengkaji kurikulum Islam di lembaga pendidikan Islam, yang merupakan analisis kebijakan pendidikan Islam.

Pendidikan dapat menjadi katalisator perubahan masyarakat. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan Vebrianto (Mahidin, 2018). Sementara itu, Nugroho dan Tilaar (Mahidin, 2018) mengatakan bahwa pendidikan berfungsi sebagai media sosial untuk transfer ilmu pengetahuan dan penyebaran budaya lokal kepada peserta didik. Proses transmisi tersebut memiliki dua tujuan. Pertama, transfer informasi dan keterampilan. Kedua, penyebaran ideologi sikap, nilai, norma, dan keyakinan. Dengan kata lain, kebijakan publik adalah kebijakan pendidikan, dan cita-cita masyarakat beradab adalah keseimbangan antara keduanya.

Sehingga dengan mempelajari dan memahami studi mengenai kebijakan publik (public policy) khususnya kebijakan pendidikan (educational policy). Hal ini sangat penting karena berkaitan dengan harapan para dosen pendidikan, tidak hanya itu tetapi juga agar mereka dianggap sebagai pendidik yang bermutu. Jika para profesional pendidikan terlibat dalam proses pembuatan kebijakan, maka lebih jauh lagi, para profesional pendidikan diharapkan memberikan kontribusi yang signifikan dalam menganalisis berbagai modus kegagalan (ketidaktepatan) dalam berbagai kebijakan pendidikan. Dari perspektif pendidikan, sekolah harus memahami nilai-nilai agama dan budaya yang telah diungkapkan oleh masyarakat dan pemerintah dalam kaitannya dengan pendidikan di sekolah. Artinya, sekolah harus mampu menghasilkan materi pembelajaran yang bermutu tinggi secara umum dan studi agama yang mematuhi standar pendidikan nasional.

Terkait dengan perluasan pendidikan sekolah, Menteri Agama RI Nomor 90 Tahun 2013 secara rinci mengatur bahwa perluasan ini merupakan proses penyelenggaraan komponen sistem pendidikan pada Raudhatul Athfal (RA), Sekolah, dan Perguruan Tinggi Agama, serta Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan. Menurut Awaliyah (2014), penting bagi guru sekolah untuk mempertimbangkan peran keyakinan agama dalam membentuk karakter peserta didiknya sebagai salah satu aspek pendidikan yang melengkapi pengetahuan umum. Karena reformasi sekolah, pendidikan di Indonesia menjadi semakin tersentralisasi. Meningkatkan keterampilan menulis dan meningkatkan

angka partisipasi sekolah di Indonesia. Sebagai komponen penting dari Sistem Pendidikan Nasional. (Erthal & Marques, 2018), (DeSanctis et al., 2018)

Namun, dalam proses pembelajaran di sekolah, siswa sering kali mengalami rasa kurang percaya diri dalam mengikuti pendidikan formal yang diselenggarakan oleh Kemendikbud (Syafaruddin dkk., 2020). Dengan demikian, penelitian yang dilakukan oleh Syafaruddin, dkk. (2020) menunjukkan bahwa mutu pendidikan yang diberikan di sekolah relatif rendah, di mana materi yang diajarkan guru tidak mampu memenuhi tuntutan satu mata pelajaran yang sangat terspesialisasi, dan rapor siswa di sekolah juga tidak terlalu baik. Oleh karena itu, sebagian besar masyarakat masih menganggap sekolah sebagai pilihan terbaik untuk memperoleh ilmu pengetahuan.

Akibatnya, meskipun saat ini terjadi krisis moral dan kenyataan bahwa pendidikan secara umum belum mampu menjawab kebutuhan untuk meningkatkan karakter dan moralitas orang Bangsa, sekolah tidak mampu meningkatkan kedudukannya di masyarakat karena tidak memiliki sumber daya yang diperlukan untuk menyelenggarakan pendidikan nasional yang dapat mengarah pada pendidikan yang lebih baik dan pada akhirnya memberantas orang Bangsa yang berkarakter dan suka melakukan kekerasan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Alawiyah (2014), disebutkan bahwa norma agama dan runtuhnya nilai-nilai yang penting untuk dipatuhi agar dapat menjadi panutan dalam perilaku saat ini merupakan contoh masalah yang berdampak negatif terhadap taraf hidup masyarakat umum. Kebiasaan keagamaan yang telah lama dipraktikkan oleh masyarakat dan rakyat mulai mengurangi dampak globalisasi. Pekerjaan yang signifikan perlu dilakukan untuk memperkuatnya, selain meningkatkan sistem pendidikan yang mempertimbangkan dengan cermat kebutuhan bangsa berkarakter dan berbudi luhur.

Akibatnya, analisis kebijakan sebagai suatu disiplin ilmu sosial terapan yang menggunakan argumentasi rasional dan fakta-fakta untuk menjelaskan, menilai, dan membuat pemikiran dalam rangka upaya memecahkan masalah kebijakan. Akibatnya, pengesahan UU Sisdiknas No. 20 tahun 2003 menekankan pentingnya memahami pendidikan, khususnya pendidikan dalam Islam, sehingga konsep pendidikan di akar rumput dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan ajaran Islam yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadits, dan tidak gagal memenuhi kebutuhan zaman.

Berdasarkan informasi yang disajikan di atas, penelitian ini akan dipublikasikan dengan tujuan sebagai sumber referensi dan memberikan informasi tentang analisis kurikulum sekolah dasar dari perspektif lingkungan sekolah. Akibatnya, kebijakan yang dilaksanakan harus selaras dengan agama dan memenuhi tujuan pendidikan nasional.

METODE PENELITIAN

Metode penulisan artikel ini didasarkan pada pendekatan kualitatif dan telaah pustaka, yang juga dikenal sebagai penelitian kepustakaan. Menelaah pustaka sesuai dengan teori yang dibahas dalam bidang manajemen pendidikan. Selain itu, kami akan meneliti artikel-artikel yang bereputasi baik maupun artikel-artikel dari jurnal yang tidak bereputasi baik. Dalam penelitian kualitatif, pengambilan sampel harus konsisten dengan asumsi metodologis. Artinya harus digunakan secara induktif, tidak mengarahkan pertanyaan yang diajukan oleh peneliti.

Alasan utama dilakukannya penelitian kualitatif adalah karena bersifat eksploratif (Hapzi Ali, Nandan Limakrisna, 2013). Terakhir, hal tersebut dinyatakan dalam bagian berjudul "Pustaka Terkait" atau Kajian Pustaka ("Tinjauan Pustaka") sebagai dasar pengujian hipotesis dan nantinya akan menjadi dasar untuk melakukan perbandingan dengan hasil atau gagasan penelitian yang relevan (Hapzi Ali, Nandan Limakrisna, 2013). Berdasarkan hal tersebut, pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menganalisis atau menelusuri berbagai jurnal, buku, dan dokumen baik berupa media kertas maupun elektronik, serta data atau informasi yang relevan dengan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mempertahankan Standar Pengajaran Istilah "kebijakan" dalam bahasa Inggris berasal dari kata "policy," yang berarti identifikasi kebutuhan atau masalah sehingga tindakan dapat diambil untuk menyelesaikannya. Jika kata "kebijakan" digabungkan dengan kata "pendidikan," istilah tersebut menjadi turunan dari "kebijakan pendidikan". Hasbullah (2015: 40) mengatakan bahwa dalam bidang pendidikan, kebijakan pemerintah memiliki konotasi yang sama dengan kebijakan pendidikan. Penyelidikan lebih lanjut mengungkapkan bahwa upaya banyak orang dan kelompok telah menghasilkan sistem pendidikan ini. (Shen & Chen, 2020), (Salimian et al., 2021), (Liao et al., 2023).

Suharno (Madjid, 2018: 8) mencatat argumen Winarno dan Wahab bahwa berbagai elemen termasuk tujuan, rencana, keputusan, peraturan, ketentuan, standar, saran, dan rancangan besar secara progresif membentuk penerapan metode ini. Karyawan mendapatkan akses ke berbagai materi yang terkait dengan pekerjaan mereka. Namun, secara umum, "politik" dapat dilihat sebagai upaya yang dipimpin pemerintah termasuk tujuan, strategi, dan program untuk memecahkan masalah atau kondisi.

Berdasarkan fakta yang disebutkan di atas, seseorang dapat mengatakan bahwa kebijakan adalah rencana besar atau serangkaian arahan yang dibuat oleh seseorang yang berkepentingan, katakanlah melalui program yang konsisten yang mengarah pada suatu

tujuan. Tilaar dan Nugroho mendefinisikan pembelaan pendidikan sebagai proses analisis, perencanaan, dan pelaksanaan ditambah penilaian. Selain itu, menurut (Arwil dayanto et al. 2018), kebijakan pendidikan merupakan reaksi pemerintah atau penyelenggara lapangan terhadap berbagai tantangan pendidikan.

Kebijakan Pendidikan Islam Dalam UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003

1) Data pendidikan islam UU Sisdiknas No. 20 tahun 2003

Meskipun UU Sisdiknas 2003 merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan pendidikan Islam di Indonesia, namun beberapa pasal termasuk Pasal 49 ayat 1 belum secara rutin dipatuhi. Prakarsa reformasi tersebut terkesan setengah hati, sehingga tidak dijalankan secara metodologis. Sebagian besar sistem dan lembaga pendidikan Islam tidak dikelola secara profesional; upaya penyegaran dan peningkatan pendidikan Islam terkadang bersifat parsial atau tidak menyeluruh dan komprehensif (Tilaar, 2010).

Namun demikian, UU Sisdiknas 2003 dengan jelas menunjukkan posisi pendidikan agama secara keseluruhan. Banyak makalah yang menyatakan bahwa pendidikan formal didasarkan dan tersusun dari pendidikan agama. Pengembangan potensi peserta didik untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, nilai-nilai moral, dan kepribadian muslim khususnya Islam sangat bergantung pada pendidikan agama (Tilaar, 2010).

Jika menelaah UU Sisdiknas 2003, terungkap bahwa pendidikan agama cukup vital bagi pendidikan nasional. Pendidikan agama lebih menitikberatkan pada upaya membantu peserta didik untuk menyadari kapasitasnya dalam beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

2) Terungkapnya Data Kebijakan Pendidikan Agama Islam Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Pendidikan agama bertujuan untuk mempersiapkan siswa dengan nilai-nilai dan pengetahuan agama yang mereka yakini sehingga mereka dapat menjadi anggota masyarakat atau ahli agama. Pendidikan agama bertujuan untuk membekali siswa agar menjadi pribadi yang menjunjung tinggi cita-cita agamanya dan menjadi ulama yang berwawasan luas, kritis, kreatif, inovatif, dan dinamis. Tujuannya adalah untuk mendidik masyarakat agar tumbuh menjadi warga negara yang bermoral dan beriman. (Karia & Asaari, 2016), (Addis et al., 2019).

Azra (2012) berpendapat bahwa pengajaran hanya menyalurkan ilmu pengetahuan dan keterampilan, sedangkan pendidikan lebih menekankan pada pembinaan kesadaran dan kepribadian peserta didik serta pendewasaannya. Melalui tata cara ini, suatu bangsa dapat menanamkan keyakinan, budaya, gagasan, dan ilmu agama kepada generasi mudanya sehingga dapat mempersiapkan mereka dalam menghadapi kehidupan.

Mengingat sistem pendidikan agama telah terkodifikasi, maka kurikulum, silabus, dan sumber belajar yang termuat dalam tujuan pembelajaran umum dan khusus menjadi sangat penting untuk diperhatikan. Lebih lanjut dibahas mengenai struktur dasar pendidikan agama serta agama-agama tertentu yang diakui di Indonesia. Kemudian, justifikasi tersebut dibahas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 sebagai acuan penyusunan tujuan pendidikan agama dan pendidikan agama sebagai turunan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

3) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 mengubah Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP). Standar Nasional Pendidikan dimanfaatkan sebagai acuan penyusunan kurikulum dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional, sesuai dengan Pasal 2 ayat 1a PP. Sementara itu, Standar Kompetensi Lulusan berfungsi sebagai kerangka acuan penyusunan Standar Isi, Standar Proses, Standar Penilaian Pendidikan, Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Standar Sarana dan Prasarana, Standar Manajemen, dan Standar Pembiayaan. Aspek terpenting dari Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 dapat ditemukan dalam standar penilaian hasil belajar. Pemerintah ini semata-mata mendorong penggunaan penilaian hasil belajar untuk: a) mengukur pencapaian kompetensi siswa, b) menyusun laporan kemajuan hasil belajar, dan c) meningkatkan proses pembelajaran. Undang-undang ini juga mengatur penilaian hasil belajar dalam pendidikan, yang diatur dalam Peraturan Menteri (Pasal 64 Ayat 2e PP No. 32/2013).

Analisis Kebijakan Pendidikan Sekolah Dasar Dari Sudut Pandang Lingkungan Sekolah.

Mengkaji pendidikan di sekolah memerlukan kesadaran akan cita-cita budaya dan agama yang diharapkan oleh masyarakat dan pemerintah. Sekolah harus menghasilkan lulusan dengan pengetahuan umum dan agama yang memenuhi kriteria pendidikan nasional dengan kualitas tinggi. Mengkaji fungsi sekolah dasar dalam menanamkan ilmu pengetahuan dan membina nilai-nilai Islam kepada generasi mendatang merupakan salah satu perhatian utama yang harus diperhatikan. Merupakan kewajiban moral sekolah dasar Islam untuk mengajarkan ilmu pengetahuan dan akhlak kepada murid-muridnya. Kegiatan sekolah dimaksudkan untuk melengkapi tujuan lembaga sehingga para lulusan diharapkan memiliki kompetensi intelektual dan berakhlak baik. (Michalakopoulou et al., 2023), (Zhao et al., 2024)

Sebuah kebijakan harus diadopsi dengan studi yang cermat, dengan mempertimbangkan lokasi sekolah, latar belakang siswa, dan latar belakang guru. Sebagai hasil dari penyertaan komponen pendukung yang tepat dalam suatu kebijakan, kualitas

sekolah dapat ditingkatkan secara efektif. Berdasarkan telaah kebijakan pendidikan sekolah dari sudut pandang sekolah dasar, maka perlu diperhatikan beberapa faktor, yaitu:

1) Input instrumental.

Selain kurikulum (yang memuat ilmu agama dan ilmu umum, serta penanaman kegiatan rutin keagamaan dan ekstrakurikuler) dan juga sarana kelas (terutama papan tulis), proses pembelajaran akan lebih optimal apabila fasilitator (Kepala Sekolah Dasar) mampu memfasilitasi secara optimal seluruh potensi yang ada di sekolah, baik potensi unsur manusianya maupun sarana prasarana sekolah yang digunakan dengan sebaik-baiknya. Fasilitator juga bertugas menyusun program yang berlaku dengan serangkaian kegiatan dan memastikan program tersebut terlaksana dalam rangka peningkatan mutu pendidikan, khususnya di sekolah dasar. (Moyano-Fuentes et al., 2019), (Fragapane et al., 2023)

2) Proses Pembelajaran

Di sekolah dasar yang menjadi tempat berlangsungnya proses pembelajaran, pengalaman hidup setiap individu akan berbeda-beda selama proses pembelajaran. Belajar dari pengalaman hidup yang berbeda-beda (Sosio-Kultural) akan menumbuhkan semangat dan integritas pendidik dan peserta didik dalam agama dan budayanya, serta berpengaruh terhadap pemahaman agama. (Gento et al., 2021), (Testorelli et al., 2022)

Pendidikan berbasis Islam sebagai salah satu hal penting bagi kehidupan diharapkan mampu mewadahi dan membangun karakter pribadi peserta didik yang senantiasa berupaya menyempurnakan iman, taqwa, dan akhlaknya serta berperan aktif membangun peradaban dan kerukunan hidup bermasyarakat, khususnya dalam memajukan peradaban bangsa yang bermartabat, cinta tanah air, yang selanjutnya juga menjadi pribadi yang memiliki landasan kemampuan dalam menghadapi tantangan, hambatan, dan perubahan. Dengan demikian, proses pembelajaran terjalin antara mata kuliah umum dan mata kuliah agama, sehingga harapan dapat terwujud dengan peran serta dan bantuan guru serta pendidik Sekolah Dasar yang profesional.

3) Kualitas pendidik

Salah satu variabel terpenting dalam mencapai hasil pendidikan yang efektif adalah sekolah dasar. Para pendidik diharapkan untuk menerapkan semua modifikasi yang dirancang untuk meningkatkan pengetahuan, watak, dan kemampuan siswa. Selain hak atas pendidikan yang lebih baik, kesejahteraan guru, status guru, dan penghapusan segala bentuk diskriminasi, pengembangan profesional pendidik merupakan salah satu perhatian utama yang mereka hadapi. (Liao et al., 2023) Hal ini karena keberhasilan pendidikan di suatu negara ditentukan oleh guru yang berkualitas.

Alfiansyah dkk. (2020) melakukan penelitian yang menunjukkan bahwa pendidik memerlukan pelatihan dan pengembangan untuk meningkatkan kemampuannya dan memastikan siswa mencapai hasil belajar setinggi mungkin di kelas. Pendidik yang kompeten adalah pendidik yang memiliki kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Lembaga pendidikan Islam dapat menerapkan kompetensi spiritual.

SIMPULAN

Penjelasan di atas mengarahkan kita untuk menyadari bahwa pengambilan keputusan kebijakan harus diubah agar sesuai dengan berbagai ciri yang mendukung pelaksanaan kebijakan yang tepat. Dalam banyak elemen lain yang harus diperhatikan dalam penerapan aturan, kapasitas guru dalam memberikan pendidikan masih sangat penting. Bahwa kebijakan yang dimaksudkan untuk pendidikan Islam bersifat cair. Peluang dan tantangan ini memaksa lembaga pendidikan untuk dapat bersaing dalam mengembangkan pendidikan tanpa kalah dari jenis pendidikan umum lainnya, sehingga memastikan bahwa sekolah merupakan anggota masyarakat yang vital.

Berdasarkan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003, kebijakan pendidikan Islam mencakup pengakuan terhadap lembaga pendidikan Islam resmi dan tidak resmi. Awalnya hanya dilihat sebagai materi, opini publik tentang pendidikan Islam telah berubah; sekarang dilihat sebagai lembaga, budaya dan kegiatan, dan sistem. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 2 Tahun 2003 serta kebijakan pemerintah yang mengendalikan pelaksanaan hukum mencerminkan hal ini. Pendidikan Islam dengan demikian dapat dilihat dalam empat hal: a) sebagai materi; b) sebagai lembaga; c) sebagai budaya; d) sebagai sistem.

DAFTAR PUSTAKA

- Addis, S., Dvivedi, A., & Beshah, B. (2019). Quality management as a tool for job satisfaction improvement in low-level technology organizations: the case of Ethiopia. *Production Planning & Control*, 30(8), 665–681. <https://doi.org/10.1080/09537287.2019.1574510>
- Alawiyah, Faridah. (2014). Pendidikan Madrasah Di Indonesia. *Aspirasi* 5(1), 51–58. <https://doi.org/10.46807/aspirasi.v5i1.449>
- Arwildayanto, Arifin Suling, Warni Tune Sumar. (2018). *Analisis Kebijakan Pendidikan*. Bandung: Cendikia Pres.
- Azra, A. (2012). *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi Menuju Millenium Baru*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Condé, G. C. P., & Martens, M. L. (2020). Six sigma project generation and selection: literature review and feature based method proposition. *Production Planning & Control*, 31(16), 1303–1312.

<https://doi.org/10.1080/09537287.2019.1706196>

- DeSanctis, I., Ordieres Mere, J. B., Bevilacqua, M., & Ciarapica, F. E. (2018). The moderating effects of corporate and national factors on lean projects barriers: a cross - national study. *Production Planning & Control*, 29(12), 972–991. <https://doi.org/10.1080/09537287.2018.1494345>
- Dowlathshahi, S., & Taham, F. (2009). The development of a conceptual framework for Just-In-Time implementation in SMEs. *Production Planning & Control*, 20(7), 611–621. <https://doi.org/10.1080/09537280903034305>
- Erthal, A., & Marques, L. (2018). National culture and organisational culture in lean organisations: a systematic review. *Production Planning & Control*, 29(8), 668–687. <https://doi.org/10.1080/09537287.2018.1455233>
- Fragapane, G., Hvolby, H.-H., Sgarbossa, F., & Strandhagen, J. O. (2023). Autonomous mobile robots in sterile instrument logistics: an evaluation of the material handling system for a strategic fit framework. *Production Planning & Control*, 34(1), 53–67. <https://doi.org/10.1080/09537287.2021.1884914>
- Gento, A. M., Pimentel, C., & Pascual, J. A. (2021). Lean school: an example of industry-university collaboration. *Production Planning & Control*, 32(6), 473–488. <https://doi.org/10.1080/09537287.2020.1742373>
- Hapzi Ali. Nandan Limakrisna. (2013). *Metodologi Penelitian (Petunjuk Praktis Untuk Pemecahan Masalah Bisnis, Penyusunan Skripsi, Tesis, dan Disertasi*. In Deepublish: Yogyakarta
- Hasbullah, M. (2015). *Kebijakan Pendidikan: Dalam Perspektif Teori, Aplikasi, Dan Kondisi Objektif Pendidikan Di Indonesia*. Depok: Raja Graffindo Persada.
- Karia, N., & Asaari, M. H. A. H. (2016). Halal value creation: its role in adding value and enabling logistics service. *Production Planning & Control*, 27(9), 677–685. <https://doi.org/10.1080/09537287.2016.1166276>
- Lameijer, B. A., Boer, H., Antony, J., & Does, R. J. M. M. (2023). Continuous improvement implementation models: a reconciliation and holistic metamodel. *Production Planning & Control*, 34(11), 1062–1081. <https://doi.org/10.1080/09537287.2021.1974114>
- Liao, Y.-Y., Soltani, E., & Wilkinson, A. (2023). From product to service quality: the role of managerial mindsets. *Production Planning & Control*, 34(8), 705–726. <https://doi.org/10.1080/09537287.2021.1957173>
- Madjid, Abd. (2018). *Analisis Kebijakan Pendidikan*. Yogyakarta: Samudra Biru
- Mahidin, La. (2018). *Kebijakan Pendidikan Islam Di Indonesia*. Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Muhammad Alfiansyah, Muhammad Shaleh Assingkily, Andi Prastowo. (2020). Kebijakan Internal Madrasah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Di MI Nurul Ummah Kotagede Yogyakarta." *Megistra: Media Pengembangan Ilmu Pendidikan Dasar Dan Keislaman*, 11(1), 52–67. <http://dx.doi.org/10.31942/mgs.v11i1.3460>
- Michalakopoulou, K., Bamford, D., Reid, I., & Nikitas, A. (2023). Barriers and opportunities to

- innovation for legal service firms: a thematic analysis-based contextualization. *Production Planning & Control*, 34(7), 604–622. <https://doi.org/10.1080/09537287.2021.1946329>
- Moyano-Fuentes, J., Bruque-Cámara, S., & Maqueira-Marín, J. M. (2019). Development and validation of a lean supply chain management measurement instrument. *Production Planning & Control*, 30(1), 20–32. <https://doi.org/10.1080/09537287.2018.1519731>
- Salimian, H., Rashidirad, M., & Soltani, E. (2017). A contingency view on the impact of supplier development on design and conformance quality performance. *Production Planning & Control*, 28(4), 310–320. <https://doi.org/10.1080/09537287.2017.1282056>
- Salimian, H., Rashidirad, M., & Soltani, E. (2021). Supplier quality management and performance: the effect of supply chain oriented culture. *Production Planning & Control*, 32(11), 942–958. <https://doi.org/10.1080/09537287.2020.1777478>
- Shen, B., & Chen, C. (2020). Quality management in outsourced global fashion supply chains: an exploratory case study. *Production Planning & Control*, 31(9), 757–769. <https://doi.org/10.1080/09537287.2019.1683774>
- Syafaruddin, Mesiono, A. Butar-butur, Muhammad Shaleh Assingkily. (2020). Manajemen Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SDIT Bunayya Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah. *AULADUNA: Jurnal Pendidikan Dasar Islam*, 7(1). <http://repository.uinsu.ac.id/id/eprint/8966>.
- Syarifah. (2013). Pengembangan Alternatif Kebijakan Pendidikan Islam." *At-Ta'dib*, 8(1), 133– 149. <http://dx.doi.org/10.21111/at-tadib.v8i1.518>
- Testorelli, R., Ferreira de Araújo Lima, P., & Verbano, C. (2022). Fostering project risk management in SMEs: an emergent framework from a literature review. *Production Planning & Control*, 33(13), 1304–1318. <https://doi.org/10.1080/09537287.2020.1859633>
- Tilaar, H.A.R. (2010). *Paradigma Baru Pendidikan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta. UU No. 20 Tahun 2003
- Zhao, G., Liu, S., Wang, Y., Lopez, C., Zubairu, N., Chen, X., Xie, X., & Zhang, J. (2024). Modelling enablers for building agri-food supply chain resilience: insights from a comparative analysis of Argentina and France. *Production Planning & Control*, 35(3), 283–307. <https://doi.org/10.1080/09537287.2022.2078246>